

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Pendidikan

NAMA INDIKATOR

APM SD/MI/Paket A

TAHUN

2017

KONSEP

- **Angka Partisipasi Murni (APM) SD** adalah perbandingan antara murid SD, Madrasah Ibtidaiyah, Paket A setara SD, usia 7-12 tahun, dengan penduduk usia 7-12 tahun, yang dinyatakan dalam persentase. ? Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu yang dinyatakan dalam persentase.
- **Sekolah Dasar (SD)** adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Pelajar sekolah dasar umumnya berusia 7-12 tahun.
- **SD** meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.
- **Madrasah Ibtidaiyah (MI)** adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.
- **Paket A** adalah Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI .

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dan Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD, RPJMD Dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Yang di Selenggarakan Oleh Pusat Pendidikan Keuangan Dan Pelatihan Pemerintahan

RUMUS

Jumlah Murid SD Usia 7–12 Tahun

APM SD = -----x100%

Jumlah Penduduk Usia 7–12 Tahun

WALI DATA

BPS Kabupaten Pemalang

UKURAN

Persen (%)

UNIT

Seksi Statistik Sosial

KEGUNAAN

Memonitor pencapaian tujuan pendidikan dasar yang diidentifikasi dalam MDGs khususnya pendidikan tingkat SD dalam program nasional (Indonesia)

INTERPRETASI

Pendidikan adalah salah satu aspek penting dari pembangunan manusia. Menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan akan meningkatkan status dan kemampuan perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam pembangunan ekonomi. Rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang pendidikan tertentu, misalnya SD menunjukkan angka di bawah 100 persen. Ini berarti bahwa pada jenjang pendidikan SD lebih banyak murid laki-laki yang bersekolah dibandingkan dengan murid perempuan. Sebaliknya, rasio APM perempuan terhadap laki-laki menunjukkan angka di atas 100 persen menggambarkan murid perempuan lebih banyak dibandingkan murid laki-laki pada jenjang pendidikan tersebut

KETERANGAN

-

SUMBER

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

METODOLOGI

- Metode pemilihan sampel dalam studi ini dilakukan dalam 6 tahap. Pada tahap pertama dipilih 7 propinsi secara purposive (sengaja) namun dapat mewakili wilayah barat dan timur Indonesia, serta wilayah urban dan rural. Ketujuh propinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur (mewakili wilayah barat), Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan (mewakili wilayah timur). Tahap kedua adalah memilih 2 kabupaten/kota dari masing-masing propinsi kecuali DKI Jakarta 3 kota secara purposive. Dari masing-masing kabupaten/kota, dipilih sampel 2 kecamatan secara purposive. Sampai dengan tahap ketiga, pemilihan sampelnya dilakukan BPS Pusat.
- Selanjutnya tahap keempat, yaitu pemilihan desa dilakukan oleh petugas BPS Propinsi dimana pada setiap kecamatan dipilih 2 desa. Tahap kelima adalah pemilihan 2 Rukun Tetangga (RT) pada setiap desa yang dilakukan oleh petugas lapangan (BPS Kabupaten/Kota) dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat RT tersebut heterogen. Tahap terakhir (keenam) adalah pemilihan rumah tangga dimana pada setiap RT dipilih 30 rumah tangga dengan cara systematic sampling yang distratakan berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Pemilihan sampel rumah tangga didasarkan pada hasil pendaftaran rumah tangga di masing-masing RT. Perhitungan interval sampel dan pemilihan angka random pertama (R1) untuk pemilihan sampel rumah tangga dilakukan pada setiap RT terpilih.
- Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap muka) antara pencacah dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Responden dari rumah tangga terpilih adalah kepala rumah tangga, suami/istri, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui secara persis karakteristik rumah tangga bersangkutan.

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

BPS RI

DOKUMEN

SIPD, LPPD

